

**Pelatihan dan Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Puskesmas
Menjadi BLUD di Kota Batu**

**LAPORAN KEGIATAN
UIN MENGABDI UIN MENGABDI *QARYAH THAYYIBAH* TAHUN 2022
TAHUN ANGGARAN 2022**

Oleh:

(Isnan Murdiansyah/198607212019031008/9907147964/Ketua)

(Bayu Agung Prahardika/2007089002/Anggota I)

(Ahmad Syauqi Hakami/ 19110068)

(Tsanja Qotrunnada Nadhifa/ 19520093)



**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG 2022**

HALAMAN PENGESAHAN

Laporan Pengabdian Kepada Masyarakat
UIN Mengabdi Qaryah Thayyibah Tahun 2022 ini disahkan oleh
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M)
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Pada tanggal 20 September 2022

Pelaksana Kegiatan

Ketua	: Nama	Isnan Murdiansyah
	NIDN	9907147964
	Tanda Tangan	
Anggota I	: Nama	Bayu Agung Prahardika
	NIDN	2007089002
	Tanda Tangan	
Anggota II	: Nama Mahasiswa	Ahmad Syauqi Hakami
	NIM	19110068
	Tanda Tangan	
Anggota III Nadhifa	: Nama Mahasiswa	Tsania Qotrunnada
	NIM	19520093
	Tanda Tangan	

Ketua LP2M
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Prof. Dr. H. Agus Maimun, M.Pd.
NIP. 196508171998031003

ABSTRAK

Pengabdian masyarakat ini bertujuan agar puskesmas di Kota Batu mampu membuat laporan keuangan yang sesuai dengan SAP No. 13. Obyek pengabdian ialah Puskesmas Kota batu terutama staf bagian akuntansi dan keuangan. Metode pelaksanaan kegiatan menggunakan *Participatory Action Research* (PAR). Hasil pengabdian masyarakat menunjukkan bahwa setelah mengikuti pelatihan dan penyusunan laporan keuangan puskesmas menjadi BLUD staf akuntansi dan keuangan puskesmas mampu menyusun laporan keuangan puskesmas sesuai SAP no. 13 dan mengetahui akun-akun serta metode pencatatan Laporan keuangan.

Kata kunci: pelatihan, pendampingan, penyusunan, Laporan keuangan puskesmas, BLUD

ABSTRACT

This community service aims to make the puskesmas in Batu City able to make financial reports in accordance with SAP No. 13. The object of service is the Batu City Health Center, especially the accounting and finance staff. The method of implementing the activities uses Participatory Action Research (PAR). The results of community service showed that after attending the training and preparing the financial statements of the puskesmas to become a BLUD, the accounting and finance staff of the puskesmas were able to compile the financial statements of the puskesmas according to SAP no. 13 and know the accounts and methods of recording financial statements.

Keywords: *Training, mentoring, preparation, health center financial reports, BLUD*

DAFTAR ISI

Halaman Pengesahan	1
Abstrak	2
Daftar isi	3
BAB I PENDAHULUAN	4
A. Latar Belakang	4
B. Permasalahan	5
C. Tujuan	5
D. Signifikansi	6
BAB II KERANGKA KONSEP	7
A. Gambaran Umum Lokasi Pengabdian	7
B. Kondisi Saat Ini Masyarakat Dampungan	8
C. Kondisi yang Diharapkan	9
D. Metode Pelaksanaan	14
E. Kajian Teori-Teori Pengabdian	17
BAB III PELAKSANAAN PENGABDIAN	18
A. Gambaran Kegiatan	18
B. Dinamika Keilmuan	21
C. Teori yang Dihasilkan dari Pendampingan	23
BAB IV DISKUSI KEILMUAN	24
A. Diskusi Data	24
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	26
B. Rekomendasi	27
DAFTAR PUSTAKA	28
Dokumentasi kegiatan	29

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) merupakan sebuah sistem yang dilaksanakan unit pelaksana teknis/badan daerah demi memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan fleksibilitas pengelolaan keuangan yang dimilikinya, sehingga diharapkan mempermudah dalam memberikan layanan secara efisien dan efektif kepada publik melalui Pola Pengelolaan Keuangan BLUD. Unit Pelaksana Teknis Dinas di daerah seperti puskesmas diharapkan pemerintah menjadi sebuah BLUD. Penerapan BLUD bagi puskesmas memberikan banyak keuntungan dan kelebihan, antara lain dana kapitasi dari BPJS bisa langsung ditransfer ke rekening puskesmas tanpa harus disetorkan dulu ke Kas Daerah. Selain itu, dengan menjadi BLUD puskesmas dapat menerapkan pengelolaan barang dan belanja secara mandiri dan fleksibel. BLUD dapat melaksanakan utang piutang, investasi dan kerja sama dengan pihak lain selama memberikan keuntungan bagi BLUD.

Melihat banyak sekali keuntungan dan kelebihan perubahan pengelolaan puskesmas menjadi BLUD tentu saja hal ini wajib disegerakan oleh puskesmas-puskesmas yang ada di daerah, apalagi dalam masa pandemi covid-19 yang membutuhkan banyak alat kesehatan (alkes), obat dan bahan medis lainnya dalam menangani pasien. Namun sayang, beberapa puskesmas di daerah yang penyebaran pandemi covid-19 tinggi di Provinsi Jawa Timur, khususnya kawasan Malang Raya di Kota Batu masih belum berubah pola pengelolaannya menjadi BLUD, karena terkendala masalah administratif yakni penyusunan laporan keuangan. Oleh karena itu, penulis akan melakukan pengabdian masyarakat melalui pelatihan dan pendampingan penyusunan laporan keuangan bagi puskesmas yang ada di Kota Batu. Puskesmas merupakan UPTD dari Dinas Kesehatan Kota Batu.

Dinas Kesehatan Kota Batu merupakan salah satu SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Batu yang dibentuk berdasarkan ketentuan Dinas Kesehatan Kota Batu merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada walikota melalui sekretaris daerah. Dinas kesehatan kota batu terletak di jalan Samadi No.71, pesangrahan, kec batu, Kota batu, Jawa timur. Tepatnya di Balaikota Among Tani. Visinya mewujudkan pelayanan kesehatan yang paripurna dan berkualitas, kemudian misinya meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat dan meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan. Ada 5 puskesmas yang ada di wilayah Kota Batu yakni:

Tabel 1 Puskesmas Kota Batu

NO	NAMA PUSKESMAS	JENIS PUSKESMAS	ALAMAT
1	Batu	Rawat Inap	Jalan Samadi No. 71, Kecamatan Batu
2	Beji	Rawat Inap	Jalan Raya Beji No. 30, Kecamatan Junrejo
3	Bumiaji	Rawat Inap	Jalan Raya Pandanrejo No. 43, Kecamatan Bumiaji
4	Junrejo	Non Rawat Inap	Jalan Raya Diponegoro No. 35, Kecamatan

			Junrejo
5	Sisir	Non Rawat Inap	Jalan Sultan Hasan Halim No. 47, Kecamatan Batu

Sumber : Dinas Kesehatan Batu (2022)

Melihat misi Dinas Kesehatan Kota Batu diatas yakni meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan kualitas kesehatan masyarakat maka peran puskesmas sangat vital sekali dalam mendukung demi tercapai terlaksananya misi tersebut. Oleh sebab itu, pola pengelolaan puskesmas menjadi BLUD di Kota Batu sangat penting dan harus disegerakan dalam waktu dekat. Dari survei dan penelitian awal penulis di puskesmas di Batu, khususnya pengelolaan keuangan terkendala dalam penyusunan dan pembuatan laporan keuangan BLUD yang sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 13 tentang penyajian dan penyusunan laporan keuangan BLU/BLUD.

B. Permasalahan

Mengacu pada survei awal dan penelitian pendahuluan di Puskesmas yang ada di wilayah Kota Batu diketahui bahwa puskesmas masih belum menjadi badan layanan umum daerah (BLUD) karena terkendala masalah syarat administratif yakni penyusunan dan pembuatan laporan keuangan sesuai dengan SAP No. 13 maka penulis tertarik dan termotivasi membantu dengan cara melakukan program pengabdian masyarakat berupa pelatihan dan pendampingan penyusunan laporan keuangan. Oleh sebab itu, maka perumusan masalah yang dipakai ialah bagaimanakah bentuk pelatihan dan pendampingan penyusunan laporan keuangan Puskesmas Menjadi BLUD di Kota Batu?

C. Tujuan

Setelah mengikuti acara program pengabdian masyarakat berupa pelatihan dan pendampingan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan SAP No. 13

diharapkan puskesmas-puskesmas yang ada di Kota Batu mampu menyusun dan menyajikan laporan keuangan BLUD yang sesuai dengan PSAP No. 13 sebagai syarat administratif perubahan pola pengelolaan keuangan menjadi BLUD sesuai dengan diatur dalam Permendagri No. 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah.

D. Signifikansi

Pola pengelolaan keuangan daerah melalui BLUD merupakan sebuah bentuk inovasi dari pemerintah demi meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya bidang kesehatan sehingga puskesmas bisa cepat dan fleksibel dalam menggunakan anggaran dan belanja tanpa harus melanggar prosedur. Selain itu, meningkatkan peran dan daya saing rumah sakit dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat luas. Oleh karena itu, keterlibatan langsung para akademisi UIN Malang dengan mengadakan acara pelatihan dan pendampingan penyusunan laporan keuangan Puskesmas di Kota Batu membawa dampak positif, antara lain:

- a. Pelayanan puskesmas lebih optimal kepada masyarakat karena tidak lagi terkendala masalah birokrasi anggaran karena sudah BLUD.
- b. Kota Batu sebagai salah satu wilayah sentral di Malang Raya mampu menjadi role model dalam pelayanan kesehatan BLUD Puskesmas.
- c. Wujud kepedulian akademisi dalam menciptakan terwujudnya *good corporate governance*, khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah
- d. Menghadirkan Puskesmas yang mempunyai pola pengelolaan keuangan BLUD efektif, efisien dan transparan yang mampu mendorong munculnya BLUD Puskesmas lainnya di wilayah Malang raya selanjutnya.
- e. Mendukung pengelolaan keuangan di Pemerintah Kota Batu demi mewujudkan *good corporate governance* dalam tata kelola keuangan dan mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK untuk ke tujuh kalinya.

BAB II

KERANGKA KONSEP

A. Gambaran Umum Lokasi Pengabdian

Secara astronomis, Kota Batu terletak diantara $112^{\circ}17'10,90''$ - $122^{\circ}57'11''$ Bujur Timur dan $7^{\circ}44'55,11''$ - $8^{\circ}26'35,45$ Lintang Selatan. Adapun batas-batas wilayah Kota Batu adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara: Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Pasuruan
- Sebelah Timur: Kabupaten Malang
- Sebelah Selatan: Kabupaten Blitar dan Kota Malang
- Sebelah Barat: Kabupaten Malang

Kota Batu terletak pada ketinggian rata-rata 862 mdpl sehingga sebagian besar daerah di Kota Batu terletak di perbukitan/lereng. Kondisi topografi Kota Batu yang sebagian besar pegunungan dan perbukitan menjadikan Kota Batu terkenal sebagai daerah dingin. Rata-rata suhu udara di Kota Batu adalah 21-23 derajat Celcius. Jenis tanah yang berada di kota Batu sebagian besar merupakan andosol, selanjutnya secara berurutan kambisol, latosol dan aluvial. Tanahnya berupa tanah mekanis yang banyak mengandung mineral yang berasal dari ledakan gunung berapi, sifat tanah semacam ini mempunyai tingkat kesuburan yang tinggi. Hasil perkebunan andalan yang menjadi komoditi utama dari Kota Batu adalah buah apel. Apel batu ini memiliki empat varietas yaitu *manalagi*, *rome beauty*, *anna*, dan *wangling*. Selain apel, Batu juga menghasilkan berbagai jenis buah lain seperti jeruk alpukat, nangka, dan pisang.

Kepadatan penduduk di Kota Batu tahun 2016 mencapai 4.921 jiwa/km². Kepadatan penduduk tertinggi di Kecamatan Batu sebesar 2.071 jiwa/km² dan kepadatan penduduk terendah di Kecamatan Bumiaji sebesar 898 jiwa/km². Dibandingkan dengan tahun 2015, penduduk Kota Batu mengalami pertumbuhan sebesar 0,91% pada tahun 2016. Rasio jenis kelamin penduduk Kota Batu yaitu

101,1 yang berarti jumlah penduduk laki-laki lebih banyak daripada jumlah penduduk perempuan.

Kota Batu merupakan salah satu kota yang baru terbentuk pada tahun 2001 sebagai pecahan dari Kabupaten Malang. Sebelumnya wilayah kota batu merupakan bagian dari Sub Satuan Wilayah Pengembangan 1 (SSWP 1) Malang Utara. Panorama alam yang indah dan udara yang sejuk menjadikan Kota Batu sebagai destinasi pariwisata yang menarik sehingga sektor pariwisata diandalkan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Beberapa objek wisata yang terdapat di Kota Batu, yaitu Wisata Alam Cangar (sumber air panas), Wisata Alam Air Terjun Cuban Talun (air terjun, area perkemahan, dan goa Jepang), Wisata Alam Air Terjun Cuban Rais, Wisata Alam Gunung Panderman, Kawasan Wisata Songgoriti, Wisata Selecta, Wisata Jatim Park, Batu Night Spectacular, Museum Satwa, dan Wisata Paralayang Gunung Banyak.

B. Kondisi Saat Ini Masyarakat Dampingan

Sesuai dengan regulasi UU Tahun 2018 diharapkan puskesmas-puskesmas yang ada di Kota Batu mampu menyusun dan menyajikan laporan keuangan BLUD yang sesuai dengan PSAP No. 13 sebagai syarat administratif perubahan pola pengelolaan keuangan menjadi BLUD sesuai dengan diatur dalam Permendagri No. 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, namun fakta dilapangan menyiratkan hal sebaliknya, dengan segalan keterbatasan SDM, IT, anggaran belanja dan lainnya 5 puskesmas yang ada di Kota Batu masih belum bisa menyusun dan menyajikan Laporan keuangan sesuai PSAP No. 13 sebagai syarat administratif puskesmas berubah menjadi BLUD.

C. Kondisi yang Diharapkan

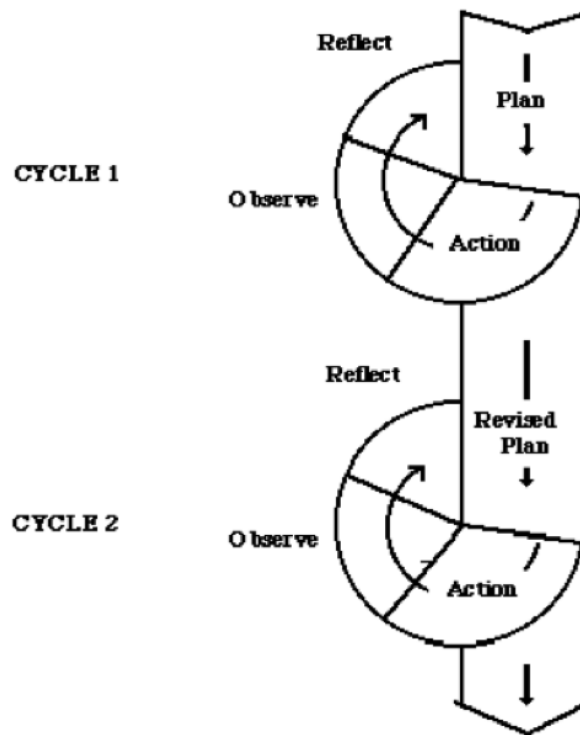
Program pengabdian masyarakat UIN Mengabdi Program Qaryah Thayibah dengan tema Pelatihan dan Penyusunan Laporan Keuangan Puskesmas Menjadi BLUD di Kota Batu bertujuan agar semua puskesmas di Kota Batu bisa menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). BLUD diperbolehkan untuk menggunakan seluruh pendapatannya untuk membiayai belanja BLUD. Hal inilah yang menjadi poin penting terkait dengan fleksibilitas untuk menunjang

pelayanan masyarakat yang lebih efektif dan efisien. Ketentuan terkait dengan pendapatan BLUD, diatur sebagai berikut: 1. Seluruh pendapatan BLUD dapat digunakan langsung untuk membiayai belanja BLUD yang bersangkutan. 2. Pendapatan BLUD meliputi pendapatan yang diperoleh dari aktivitas peningkatan kualitas pelayanan BLUD sesuai kebutuhan. Pendapatan utama BLUD berasal dari imbalan jasa pelayanan yang diberikan, namun pendapatan BLUD tidak hanya berasal dari imbalan tersebut. Menurut ketentuan, pendapatan BLUD bersumber dari: jasa layanan, berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat, 2. hibah, dapat berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain. Pendapatan hibah digunakan sesuai dengan tujuan pemberian hibah, sesuai dengan peruntukannya yang selaras dengan tujuan BLUD sebagaimana tercantum dalam naskah perjanjian hibah, hasil kerja sama dengan pihak lain, dapat berupa hasil yang diperoleh dari kerja sama BLUD, 4. APBD, berupa pendapatan yang berasal dari DPA APBD, 5. lain-lain pendapatan BLUD yang sah, meliputi: a. jasa giro; b. pendapatan bunga; c. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; d. komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD; e. investasi; dan f. pengembangan usaha.

D. Metode Pelaksanaan

Penggunaan metode PAR ini menempatkan peneliti sebagai fasilitator bagi puskesmas dan Dinas Kesehatan dalam meraih menggapai impian serta memberikan solusi serta merumuskan cara yang mudah dipakai puskesmas dalam mencari jalan keluar demi bisa menyajikan dan menyusun laporan keuangan BLUD sesuai dengan PSAP No. 13. Sebagai pedoman melakukan PAR ini, metode digunakan merujuk pada metode yang dikemukakan MacIsaac (1995) yang dikenal dengan teori *Socio-technical Systems* (STS) seperti gambar berikut,

Gambar 1. Model sederhana *action research*



Sumber: MacIsaac (1995)

Berdasarkan gambar 1 tentang model sederhana *action research*, maka dapat diambil informasi bahwa secara umum *action research* terdiri dari empat tahapan, yaitu:

1. Perencanaan (*plan*). Tahap perencanaan ini merupakan upaya pemetaan kondisi riil dari masyarakat menggunakan analisis *strength*, *weakness*, *opportunity* dan *treats* (SWOT). Upaya menganalisis problematika keuangan puskesmas berguna untuk memetakan kekuatan, kelemahan, peluang dalam pengelolaan keuangan puskesmas.
2. Tindakan (*action*). Pihak manajemen puskesmas melakukan implementasi rencana yang telah disusun yang dibantu dan difasilitatori peneliti.
3. Pengamatan (*observe*). Pengamatan dilakukan untuk memperhatikan dan menganalisis keberhasilan, kekurangan, kelemahan dan kekuatan strategi dan metode yang dipakai dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di puskesmas.

4. Refleksi (*reflect*). Usaha yang telah dilakukan untuk memecahkan permasalahan di puskesmas wilayah Kota Batu tersebut kemudian direfleksi dan dievaluasi yang meliputi keberhasilan, kekurangan, kelemahan dan kekuatan dari metode dan strategi yang diterapkan. Tahapan refleksi dan evaluasi ini akan memberikan informasi yang berguna untuk menyusun rencana (*plan*) yang akan digunakan untuk menyelesaikan permasalahan baru dalam penyusunan laporan keuangan puskesmas sampai pada terwujudnya penyusunan dan penyajian laporan keuangan puskesmas yang sesuai dengan PSAP No. 13.

Dalam penelitian action research ini terdapat 4 tahapan yang harus dilakukan untuk penggalan data sampai pada tahap pemecahan masalah, antara lain:

1. Perencanaan (*plan*). Perencanaan ini dilakukan setelah memperhatikan kondisi keuangan dan peta transaksi keuangan di Puskesmas menggunakan analisis *strength, weakness, opportunity* dan *treat* (SWOT). Analisis ini melibatkan secara langsung pihak manajemen Puskesmas dan Dinas kesehatan di Kota Batu. Perencanaan ini meliputi strategi dan metode dalam memecahkan problematika yang dihadapi oleh puskesmas.
2. Tindakan (*action*). Setelah melakukan proses perencanaan dan memperoleh informasi yang berkenaan dengan data keuangan puskesmas, maka pihak manajemen puskesmas masyarakat Desa Sumberpucung mengimplementasikan rencana yang telah disusun sebagaimana pada tahap pertama (*plan*) yang difasilitatori oleh peneliti khususnya yang berhubungan penyusunan dan penyajian laporan keuangan sesuai dengan SAP No. 13.
3. Pengamatan (*observe*). Pengamatan dilakukan untuk memperhatikan dan menganalisis keberhasilan, kelemahan dan kekurangan dari strategi dan metode yang digunakan dalam menyelesaikan problematika yang dihadapi puskesmas dalam pengelolaan keuangannya. Termasuk aspek-aspek pendukung dan penghambat yang berhasil diidentifikasi selama kegiatan berlangsung. Sehingga hasil dari pengamatan ini dapat memperoleh peta kaji tindak yang akan dilakukan untuk memecahkan permasalahan puskesmas di

Kota Batu khususnya berkenaan dengan praktik penyajian dan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan SAP No. 13.

4. Refleksi (*reflect*). Usaha-usaha yang telah dilakukan untuk memecahkan permasalahan selama menerapkan penyusunan dan penyajian laporan keuangan puskesmas sesuai dengan PSAP No. 13.

E. Kajian Teori-Teori Pengabdian

1. Badan Layanan Umum (BLU)

Menurut Pasal 1 angka 23 UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, BLU merupakan sebuah instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk demi memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa dijual tanpa mencari keuntungan dalam operasionalnya berdasarkan prinsip produktivitas dan efisiensi. Kemudian dinyatakan kembali dalam PP No. 23 Tahun 2005 sebagai peraturan pelaksanaan dan Pasal 69 ayat (7) UU No. 1 Tahun 2004 Pasal 2 menjelaskan bahwa BLU bertujuan meningkatkan pelayanan masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas serta penerapan praktik bisnis sehat, Kemudian Azas BLU menurut Pasal 3 PP No. 23 Tahun 2005, yakni: Mengadakan pelayanan umum pengelolaannya berdasarkan wewenang didelegasikan tidak terpisah dari instansi induk secara hukum, Pejabat BLU bertanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan layanan umum kepada pimpinan instansi induk, BLU tidak mencari keuntungan, Anggaran serta rencana kerja dan laporan BLU dengan instansi induk tidak terpisah serta pengelolaan selaras dengan praktik bisnis yang sehat.

2. Puskesmas sebagai BLU

Puskesmas yang sudah menjadi BLUD menggunakan standar pelayanan minimal yang ditetapkan menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota sesuai dengan wewenang masing-masing dengan mempertimbangkan mutu layanan, kesetaraan pelayanan, biaya serta akses dalam memperoleh layanan. Dalam hal puskesmas, standar pelayanan minum ditetapkan dan disahkan kepala

daerah melalui peraturan kepala daerah. Standar pelayanan minimum tersebut harus memenuhi syarat, antara lain: Fokus mengutamakan kegiatan pelayanan demi menunjang tercapainya tugas dan fungsi BLU/BLUD, terukur artinya dapat dinilai dengan standar yang ditetapkan, dapat dicapai, relevan dan dapat diandalkan serta tepat waktu antara jadwal dengan kegiatan pelayanan yang telah ditetapkan.

3. Laporan Keuangan BLUD Puskesmas

Terbitnya PP No. 23 Tahun 2005, layanan kesehatan pemerintah daerah mengalami perubahan menjadi BLU. Dampaknya pertanggungjawaban keuangan tidak lagi ke Dinas Kesehatan tapi ke Departemen Keuangan, sehingga proses penyusunan dan pembuatan laporan keuangan harus mengikuti standar akuntansi pemerintahan (SAP) yang berpedoman pada prinsip akuntabilitas, transparansi dan efisiensi. Laporan keuangan puskesmas disusun pihak manajemen sebagai bentuk penyajian dan penyampaian laporan keuangan entitas. Laporan keuangan tersebut disampaikan kepada stakeholder dan pihak terkait berkepentingan dengan entitas tersebut, sehingga isi pelaporan keuangan puskesmas harus mengikuti ketentuan pelaporan keuangan sebagaimana diatur menurut SAP, yaitu SAP No. 13 tentang penyajian dan penyusunan laporan keuangan BLU/BLUD, kemudian laporan keuangan tersebut wajib diaudit oleh auditor independen (KAP). Laporan keuangan BLUD Puskesmas yang disusun harus memberikan informasi antara lain: pengukuran jasa atau manfaat entitas terkait, pertanggungjawaban pihak manajemen puskesmas dalam bentuk laporan operasional/aktivitas dan laporan arus kas, mengetahui kontinuitas pemberian jasa dalam bentuk laporan aktivitas serta mengetahui posisi keuangan dalam bentuk neraca. Sesuai dengan PSAP no. 13 laporan keuangan yang harus dibuat Puskesmas yang sudah menjadi BLUD, antara lain: Laporan operasional (yaitu penghasilan, beban dan surplus/defisit), Laporan perubahan ekuitas/LPE, Neraca berisi aset, kewajiban dan ekuitas, Laporan Realisasi Anggaran/LRA, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL), Laporan arus kas yang terdiri dari aktivitas operasi, aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan/pembiayaan dan Catatan atas Laporan Keuangan.

BAB III

PELAKSANAAN PENGABDIAN

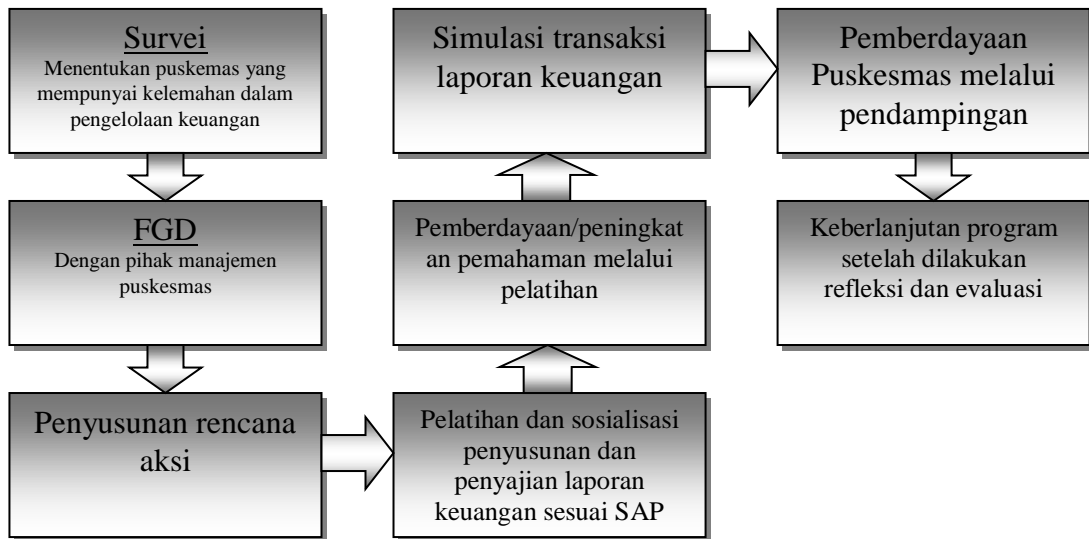
A. Gambaran Kegiatan

Demi mewujudkan tercapainya BLUD di Puskesmas daerah wilayah Kota Batu maka metode *participatory action research* (PAR) digunakan dalam rangka memetakan simpul keuangan dan segala faktor yang terlibat, antara lain terkait dengan 1). Kelemahan yang dimiliki oleh puskesmas di wilayah Batu, 2). Memetakan kebutuhan laporan keuangan sesuai dengan SAP guna mengatasi kelemahannya, 3). Menyusun strategi dan metode demi memecahkan masalah yang dihadapi puskesmas di Batu, dan 4) membantu puskesmas memecahkan masalah dan menemukan solusi terbaik.

Metode *action research* ini memosisikan puskesmas sebagai subyek menarik dan punya potensi dikembangkan. Harapannya puskesmas sendiri sendirilah yang akan mampu memahami masalah yang dihadapi, mau berubah dan mencari jalan solusi pemecahan masalah yang dihadapinya. Berdasarkan isu dan masalah yang dipetakan berkenaan dengan kondisi puskesmas di Batu dan strategi yang digunakan dalam model *participatory action research* (PAR), maka bentuk kegiatan yang dilaksanakan yakni:

1. Focus group discussion (FGD) demi mengakomodir kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi puskesmas di wilayah Batu yang berhubungan dengan pola pengelolaan keuangan.
2. Workshop sosialisasi tentang penyusunan dan penyajian laporan keuangan BLUD sesuai SAP No. 13.
3. Pelatihan dan Pendampingan penyusunan laporan keuangan BLUD Puskesmas.
4. Pendampingan puskesmas secara kontinu dan berkelanjutan demi mencapai hasil yang diharapkan.

Gambar 1. Alur kegiatan pelatihan dan pendampingan Puskesmas di Batu



Kegiatan pengabdian masyarakat berupa Pelatihan dan Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Puskesmas Menjadi BLUD di Kota Batu terbagi dalam 4 tahapan kegiatan, antara lain. Pertama, kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dengan staf puskesmas batu yang diikuti 10 orang, antara lain Staf Akuntansi, Bendahara JKN, Bendahara PAD dan staf lainnya yang dilakukan pada tanggal 8 Juli 2022 di ruang pertemuan anterior lantai 2 Puskesmas Batu. Tujuan kegiatan ini untuk sharing dan tukar pendapat tentang kondisi keadaan keuangan di puskesmas Batu dan faktor hambatan apa saja yang membuat Puskesmas Batu masih belum bisa membuat Laporan keuangan yang sesuai dengan SAP. Kegiatan kedua berupa Pelatihan Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Puskesmas yang diadakan tanggal 26 Juli 2022 di ruang pertemuan anterior lantai 2 Puskesmas Batu dengan pemateri Bapak Eko Fatah Yasin, SE, M. Ak, Ak, CA, CPA, CPI (Managing Partner KAP JNJ dan KJA Yasin & Yasin) memberikan materi tentang penyusunan Laporan keuangan BLUD Puskesmas dengan peserta staf akuntansi, bendahara JKN, Bendahara PAD dan staf lainnya. Pada tahap kegiatan ini peserta memperoleh pemahaman dan pengetahuan antara lain:

- Kegunaan dari pencatatan transaksi berdasarkan SAP bagi Puskesmas
- Jenis-jenis transaksi yang harus dicatat oleh puskesmas

- Laporan keuangan yang dihasilkan dan dibuat oleh Puskesmas
- Pengenalan Laporan keuangan BLUD Puskesmas sesuai SAP No. 13
- Isi serta informasi yang dihasilkan dari Laporan keuangan BLUD Puskesmas

Tahap ketiga dan keempat yakni kegiatan Sosialisasi dan Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Puskesmas Menjadi BLUD di Kota Batu yang diadakan tanggal 24 dan 25 Agustus di ruang pertemuan anterior lantai 2 Puskesmas Batu. Kegiatan ini diikuti peserta dari staf puskesmas batu, dengan tujuan memberikan wawasan dan pemahaman tentang pentingnya perubahan Puskesmas menjadi BLUD agar lebih lincah, efektif dan efisien dalam proses operasionalnya. Pada tahap ini setelah peserta memahamai transaksi keuangan pemerintahan dan penyusunan Laporan keuangan BLUD Puskesmas peserta didorong untuk aktif menyelesaikan soal latihan sederhana secara bersama-sama. Tahap terakhir adalah sesi tanya jawab dan konsultasi seputar pencatatan transaksi dan laporan keuangan. Pada tahap ini beberapa peserta mengungkapkan beberapa kendala dan hambatan dalam pencatatan transaksi mereka dan menanyakan beberapa hal yang belum mereka pahami terkait Laporan keuangan BLUD Puskesmas berbasis SAP No. 13.

Ada beberapa hasil dan luaran yang dicapai dari hasil pengabdian masyarakat berupa pelatihan dan penyusunan Laporan keuangan puskesmas menjadi BLUD di Kota Batu, antara lain:

1. Sebelum dilaksanakan kegiatan pelatihan dan pendampingan, para staf puskesmas batu belum menyadari sepenuhnya kegunaan dari pencatatan transaksi keuangan pemerintahab berdasarkan standar akuntansi pemerintahan (SAP). Setelah dilaksanakan pelatihan dan pendampingan pihak puskesmas Batu mulai menyadari pentingnya pencatatan transaksi keuangan pemerintahan menuju BLUD.
2. Sebelum dilaksanakan kegiatan pelatihan, mayoritas staf puskesmas belum mengerti dan memahami Laporan keuangan yang harus dibuat Puskesmas bila menjadi BLUD, mereka hanya bisa membuat Laporan keuangan realisasi anggaran saja (LRA). Setelah melaksanakan pelatihan dan pendampingan pihak

puskesmas Batu sudah bisa membuat 7 laporan keuangan (LRA, LO, LPE, Laporan Arus kas, Laporan Perubahan SAL, Neraca, Catatan Atas Laporan Keuangan) sesuai dengan SAP no. 13.

3. Sebelum dilakukan kegiatan pelatihan dan pendampingan, pihak puskesmas belum begitu memahami jenis-jenis transaksi pemerintahan baik secara cash maupun accrual basis. Setelah dilakukan pelatihan dan pendampingan mereka dapat memahami dengan baik jenis-jenis transaksi keuangan pemerintahan baik secara cash maupun accrual basis yang harus mereka catat.

4. Sebelum dilakukan kegiatan pelatihan dan pendampingan, pihak puskesmas masih belum mengetahui apa itu Laporan keuangan BLUD berdasarkan SAP No. 13, bentuk dan isi laporan keuangan serta informasi yang dihasilkan dari masing-masing Laporan keuangan. Setelah dilakukan pelatihan dan pendampingan, mereka dapat mengetahui apa itu Laporan keuangan BLUD sesuai SAP no. 13 serta dapat melihat bentuk dan isi laporan keuangannya.

5. Sebelum dilakukan pelatihan dan pendampingan, para staf Puskesmas Batu belum memahami konsep dasar persamaan akuntansi dalam transaksi sektor publik/pemerintahan, dengan adanya pelatihan dan pendampingan mereka mulai dapat memahami konsep persamaan akuntansi dan penerapannya dalam mencatat beberapa contoh transaksi keuangan di sektor pemerintahan.

B. Dinamika Keilmuan

1. Badan Layanan Umum (BLU)

Menurut Pasal 1 angka 23 UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, BLU merupakan sebuah instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk demi memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa dijual tanpa mencari keuntungan dalam operasionalnya berdasarkan prinsip produktivitas dan efisiensi. Kemudian dinyatakan kembali dalam PP No. 23 Tahun 2005 sebagai peraturan pelaksanaan dan Pasal 69 ayat (7) UU No. 1 Tahun 2004 Pasal 2 menjelaskan bahwa BLU bertujuan meningkatkan pelayanan masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan

kehidupan bangsa dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas serta penerapan praktik bisnis sehat, Kemudian Azas BLU menurut Pasal 3 PP No. 23 Tahun 2005, yakni: Mengadakan pelayanan umum pengelolaannya berdasarkan wewenang didelegasikan tidak terpisah dari instansi induk secara hukum, Pejabat BLU bertanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan layanan umum kepada pimpinan instansi induk, BLU tidak mencari keuntungan, Anggaran serta rencana kerja dan laporan BLU dengan instansi induk tidak terpisah serta pengelolaan selaras dengan praktik bisnis yang sehat.

2. Puskesmas sebagai BLUD

Puskesmas yang sudah menjadi BLUD menggunakan standar pelayanan minimal yang ditetapkan menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota sesuai dengan wewenang masing-masing dengan mempertimbangkan mutu layanan, kesetaraan pelayanan, biaya serta akses dalam memperoleh layanan. Dalam hal puskesmas, standar pelayanan minum ditetapkan dan disahkan kepala daerah melalui peraturan kepala daerah. Standar pelayanan minimum tersebut harus memenuhi syarat, antara lain: Fokus mengutamakan kegiatan pelayanan demi menunjang tercapainya tugas dan fungsi BLU/BLUD, terukur artinya dapat dinilai dengan standar yang ditetapkan, dapat dicapai, relevan dan dapat diandalkan serta tepat waktu antara jadwal dengan kegiatan pelayanan yang telah ditetapkan.

3. Laporan Keuangan BLUD Puskesmas

Terbitnya PP No. 23 Tahun 2005, layanan kesehatan pemerintah daerah mengalami perubahan menjadi BLU. Dampaknya pertanggungjawaban keuangan tidak lagi ke Dinas Kesehatan tapi ke Departemen Keuangan, sehingga proses penyusunan dan pembuatan laporan keuangan harus mengikuti standar akuntansi pemerintahan (SAP) yang berpedoman pada prinsip akuntabilitas, transparansi dan efisiensi. Laporan keuangan puskesmas disusun pihak manajemen sebagai bentuk penyajian dan penyampaian laporan keuangan entitas. Laporan keuangan tersebut disampaikan kepada stakeholder dan pihak terkait berkepentingan dengan entitas tersebut, sehingga isi pelaporan keuangan puskesmas harus mengikuti

ketentuan pelaporan keuangan sebagaimana diatur menurut SAP, yaitu SAP No. 13 tentang penyajian dan penyusunan laporan keuangan BLU/BLUD, kemudian laporan keuangan tersebut wajib diaudit oleh auditor independen (KAP). Laporan keuangan BLUD Puskesmas yang disusun harus memberikan informasi antara lain: pengukuran jasa atau manfaat entitas terkait, pertanggungjawaban pihak manajemen puskesmas dalam bentuk laporan operasional/aktivitas dan laporan arus kas, mengetahui kontinuitas pemberian jasa dalam bentuk laporan aktivitas serta mengetahui posisi keuangan dalam bentuk neraca. Sesuai dengan PSAP no. 13 laporan keuangan yang harus dibuat Puskesmas yang sudah menjad BLUD, antara lain: Laporan operasional (yaitu penghasilan, beban dan surplus/defisit), Laporan perubahan ekuitas/LPE, Neraca berisi aset, kewajiban dan ekuitas, Laporan Realisasi Anggaran/LRA, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL), Laporan arus kas yang terdiri dari aktivitas operasi, aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan/pembiayaan dan Catatan atas Laporan Keuangan.

C. Teori yang Dihasilkan dari Pendampingan

1. Teori Pemberdayaan (Empowerment)

Pemberdayaan dilahirkan dari bahasa Inggris, yakni *empowerment*, yang mempunyai makna dasar 'pemberdayaan', di mana 'daya' bermakna kekuatan (*power*). Pemberdayaan adalah suatu konsep pembangunan masyarakat, di mana secara teknis merupakan cara untuk membentuk atau membuat berdaya pada suatu obyek. Dengan demikian ketika mengkaji usaha mikro sebagai obyek, maka tentunya pemberdayaan ditujukan untuk membuat berdaya pengusaha-pengusaha mikro tersebut.

Pada umumnya makna pemberdayaan adalah suatu upaya penyadaran atas eksistensi dirinya terhadap keberfungsian sosialnya. Ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan konsep mengenai kekuasaan dan kekuatan. Menurut Shardlow (1998:32) Pemberdayaan pada intinya membahas bagaimana individu, kelompok ataupun komunitas berusaha mengontrol kehidupan mereka sendiri dan mengusahakan untuk membentuk masa depan sesuai dengan keinginan

mereka (*"such a definition of empowerment is centrally about taking control of their own lives and having the power to shape own future"*).

Bryan & White (1987) menyatakan pemberdayaan sebagai upaya menumbuhkan kekuasaan dan wewenang yang lebih besar kepada masyarakat miskin. Dengan cara menciptakan mekanisme dari dalam (*build-in*) untuk meluruskan keputusan-keputusan alokasi yang adil, yakni dengan menjadikan rakyat mempunyai pengaruh.

Sementara Freire (Sutrisno, 1999) menyatakan empowerment bukan sekedar memberikan kesempatan rakyat menggunakan sumber daya dan biaya pembangunan saja, tetapi juga upaya untuk mendorong mencari cara menciptakan kebebasan dari struktur yang opresif. Konsep lain menyatakan bahwa pemberdayaan mempunyai dua makna, yakni mengembangkan, memandirikan, menswadayakan dan memperkuat posisi tawar menawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan penekan di segala bidang dan sektor kehidupan. Makna lainnya adalah melindungi, membela dan berpihak kepada yang lemah, untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang dan terjadinya eksploitasi terhadap yang lemah (Priyono dan Pranarka, 1996). Dalam pandangan Pearse dan Stiefel dinyatakan bahwa pemberdayaan mengandung dua kecenderungan, yakni primer dan sekunder. Kecenderungan primer berarti proses pemberdayaan menekankan proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan atau kemampuan kepada masyarakat agar individu menjadi lebih berdaya. Sedangkan kecenderungan sekunder melihat pemberdayaan sebagai proses menstimulasi, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihannya (Priyono dan Pranarka, 1996). Salah satu indikator dari keberdayaan masyarakat adalah kemampuan dan kebebasan untuk membuat pilihan yang terbaik dalam menentukan atau memperbaiki kehidupannya. Konsep pemberdayaan merupakan hasil dari proses interaksi di tingkat ideologis dan praksis. Pada tingkat ideologis, pemberdayaan merupakan hasil interaksi antara konsep *top-down* dan *bottom-up*, antara *growth strategy* dan *people centered strategy*. Sedangkan di tingkat praksis, proses interaksi terjadi melalui pertarungan antar ruang otonomi. Maka, konsep

pemberdayaan mencakup pengertian pembangunan masyarakat (*community development*) dan pembangunan yang bertumpu pada masyarakat (*community based development*).

Community development adalah suatu proses yang menyangkut usaha masyarakat dengan pihak lain (di luar sistem sosialnya) untuk menjadikan sistem masyarakat sebagai suatu pola dan tatanan kehidupan yang lebih baik, mengembangkan dan meningkatkan kemandirian dan kepedulian masyarakat dalam memahami dan mengatasi masalah dalam kehidupannya, mengembangkan fasilitas dan teknologi sebagai langkah meningkatkan daya inisiatif, pelayanan masyarakat dan sebagainya. Secara filosofis, *community development* mengandung makna "membantu masyarakat agar bisa menolong diri sendiri", yang berarti bahwa substansi utama dalam aktivitas pembangunan masyarakat adalah masyarakat itu sendiri.

Pemberdayaan tidak hanya melibatkan kemampuan/keberdayaan secara fisik (kepemilikan sumber daya/faktor produksi), tetapi juga non fisik (aktualisasi diri dan kepercayaan diri). Sehingga program pemberdayaan ditujukan untuk menghilangkan ketergantungan, bahwa syarat mutlak program pemberdayaan adalah orientasinya yang selalu tertuju kepada kemandirian, kesinambungan, dan keberlanjutan.

Salah satu teori pembangunan yang menjadi rujukan utama dalam perspektif ini adalah *People Centered Development*. Dalam implementasinya, teori ini banyak digunakan dalam pendekatan pemberdayaan. Pendekatan pemberdayaan digunakan karena diyakini sumber masalah kemiskinan dan keterbelakangan adalah ketidakberdayaan. Kondisi ketidakberdayaan di samping disebabkan karena proses sejarah perkembangan sosial ekonomi negara-negara yang sedang berkembang yang cukup panjang terutama pada periode kolonial, juga disebabkan karena penggunaan pendekatan pembangunan masyarakat yang digunakan sebelumnya yang justru membuat masyarakat khususnya pada tingkat komunitas lokal menjadi marginal.

Pendekatan yang digunakan dalam proses pembangunan masyarakat yang menjadi penyebab terjadinya ketidakberdayaan inilah yang kemudian

mendapatkan kritik dan anti tesis dan selanjutnya menawarkan tesis dan perspektif baru yang menggunakan pendekatan pemberdayaan tersebut. Perspektif yang menggunakan pendekatan pemberdayaan ini sudah cukup lama mendapat giliran menjadi arus utama pemikiran dan landasan kebijakan pembangunan masyarakat di negara-negara yang sedang berkembang. Sudah banyak program pembangunan masyarakat yang dilaksanakan berdasarkan perspektif ini, sehingga hasilnya sudah dapat dilihat untuk membuat penilaian tentang kompetensi perspektif dan pendekatan ini dalam merespon persoalan dan menjawab keinginan masyarakat guna memperbaiki kondisi kehidupannya (Soetomo, 2011).

Dalam hal pemberdayaan masyarakat miskin maka diperlukan peran pemerintah beserta tokoh peduli lainnya guna mendistribusikan sumber daya yang sekiranya bermanfaat mengembangkan potensi masyarakat miskin. Secara umum, pemberdayaan masyarakat dalam ekonomi merupakan masalah yang sering ditemui. Hal ini terkait dengan akses terhadap sumber daya ekonomi sebagai pelaku ekonomi. Seperti yang dijelaskan oleh Sandra (2002), bahwa pemberdayaan masyarakat adalah proses perolehan pelaku ekonomi untuk mendapatkan *surplus value* sebagai hak manusia yang terlibat dalam kegiatan produksi. Upaya ini dilakukan melalui distribusi penguasaan faktor-faktor produksi (melalui kebijakan politik ekonomi yang tepat dengan kondisi dan tingkatan sosial budaya).

Secara konseptual, pemberdayaan atau pemberkuasaan (*empowerment*), berasal dari kata power (kekuasaan atau keberdayaan). Karenanya, ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan konsep mengenai kekuasaan. Kekuasaan seringkali dikaitkan dengan kemampuan kita untuk membuat orang lain melakukan apa yang kita inginkan, terlepas dari keinginan atau minat mereka. Ilmu sosial tradisional berkaitan dengan pengaruh dan kontrol. Pengertian ini mengasumsikan bahwa kekuasaan sebagai sesuatu yang tidak berubah atau tidak dapat dirubah. Kekuasaan sesungguhnya tidak terbatas pada pengertian ini saja.

BAB IV

DISKUSI KEILMUAN

A. Diskusi Data

Dampak Program Pelatihan dan Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Terhadap Pengembangan Kelembagaan

Dari hasil survei dan pengamatan lapangan, Program Pelatihan dan Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan ini muncul sebagai “katalisator” timbulnya potensi kelembagaan baru. Hal ini berimplikasi pada pengembangan dan sebagai pemicu Bergeraknya Puskesmas di Kota Batu.

Bila dilihat orientasi atau titik tekan dari program pelatihan dan penyusunan Laporan keuangan diatas, maka untuk itu penting artinya bagi pihak manajemen Puskesmas dalam memajemen dan dari segi teknis, sehingga diperlukan tenaga profesional seperti pendampingan dan pembinaan. Maka, sangat penting artinya sebuah SDM baik kuantitas maupun kualitasnya. Pendampingan disini dilakukan dengan meyakinkan, memancing, serta merangsang output atau keluaran hasil untuk mengatasi problem Puskesmas. Proses ini memerlukan sebuah komunikasi yang instensif antara pendamping program dengan mitra binaan dalam hal ini Puskesmas dengan didasarkan rasa saling percaya (*mutually of trust*), (Zubaedi, 2007).

Permasalahan Penyusunan Laporan Keuangan

Dalam proses operasionalnya, Puskesmas Batu ini tak lepas dari berbagai masalah. Beberapa permasalahan yang terjadi, antara lain:

1. Terbatasnya Modal.

Masalah terbesar dalam pembangunan Puskesmas di Indonesia sebelum menjadi BLUD selama ini adalah masih terbatas atau kurangnya modal. Akibatnya mereka sendiri sangat sulit untuk berkembang dan berinisiatif dalam mencari dan menemukan potensi sumber pendapatannya sendiri.

Disinilah nampak lemahnya “*political will*” pemerintah pusat dalam menata anggaran. Di lain pihak, potensi kolateral yang dimiliki rumah tangga puskesmas juga masih rendah. Pada titik inilah nampak sekali peranan pelatihan dan penyusunan Laporan keuangan puskesmas yang ada dalam membantu mengatasi masalah permodalan dan akses permodalan ke pusat dalam rangka mengembangkan dan memajukan puskesmas di Kota Batu.

2. Lemahnya kualitas infrastruktur teknologi informasi dan SDM

Dari hasil pengamatan lapangan diketahui bahwa penyusunan laporan keuangan di puskesmas Kota Batu masih manual dan belum terintegrasi satu sama lain antara bendahara PAD, bendahara JKN dan bendahara provinsi sehingga seringkali pencatatan kurang efektif dan ada yang ketlisut. Begitu juga dengan tenaga keuangan dan akuntansi juga bukan orang keuangan dan akuntansi murni sehingga kualitas SDM dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan kurang sehingga kualitas laporan keuangan juga kurang dan reliabel dalam pengambilan keputusan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari kegiatan pengabdian masyarakat yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- a. Adanya pelatihan dan pendampingan terkait laporan keuangan puskesmas menjadi BLUD telah meningkatkan pemahaman dan wawasan para staf Puskesmas akan arti pentingnya penyusunan dan pencatatan dan pelaporan keuangan sesuai dengan SAP no.13 tentang penyajian dan penyusunan laporan keuangan BLU/BLUD.
- b. Pelatihan dan pendampingan sederhana terkait konsep dasar akuntansi memudahkan mereka dalam melakukan pencatatan transaksi di pemerintahan secara benar.
- c. Adanya kegiatan pengabdian masyarakat ini sangat bermanfaat untuk menambah wawasan dan meningkatkan pemahaman mereka akan laporan keuangan BLUD berdasarkan SAP No. 13.

B. Rekomendasi

- a. Keterbatasan waktu dan dana menyebabkan kurang maksimalnya pelatihan dan pendampingan yang diberikan. Untuk kegiatan pengabdian masyarakat selanjutnya dapat diadakan pelatihan yang intensif mengenai pencatatan dan penyusunan laporan keuangan puskesmas menjadi BLUD berdasarkan SAP No. 13.
- b. Selain itu sesuai dengan permintaan peserta, dapat pula dilakukan penyuluhan dan pelatihan terkait pembuat laporan SAKIP berbasis kinerja di puskesmas.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, V. (2020). Analisis Akuntabilitas, Transparasi dan Value for Money dalam Prinsip Good Governance untuk Alokasi Dana Desa di Desa Banjarsari Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang. *E-Theses UIN Maulana Malik Ibrahim Malang*.
- Arikunto, S. (2016). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Emzir, D. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif, Analisis Data*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Ghony, M., & Almashur, F. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Lembaga Administrasi Negara, & Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI. (2000). *Akuntabilitas dan Good Governance. Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP)*. Jakarta: LAN BKP RI.
- Lukito, Penny, & Kusumastuti. (2014). *Membumikan Transparasi dan Akuntabilitas Kinerja Sektor Publik: Tantangan Demokrasi ke Depan*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Mahmudi. (2013). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFPE.
- Nazir, M. (2011). *Metode Penelitian Cetakan 6*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Novianto, D. (2019). *Tepat Guna Pengelolaan Keuangan Desa*. Kalimantan Barat: CV Derwati Press.
- Peraturan Bupati No. 38 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Pemendagri Nomor 113 Tahun 2014. Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Pemendagri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pembangunan Desa
- Pemendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014
-

- Renitasari, T. (2020). Akuntabilitas dan Transparansi Perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Timahan Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek. *E-Theses UIN Maulana Malik Ibrahim Malang*.
- Suminto. (2018). Akuntabilitas dan Efektivitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dalam Meningkatkan Kinerja Pemerintah Desa di Desa Sambirejo Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun. *E-Theses UIN Maulana Malik Ibrahim Malang*.
- Sumpeno, W. (2001). *Perencanaan Desa Terpadu*. Banda Aceh: Read.
- Suprihatini, A. (2018). *Pemerintahan Desa dan Kelurahan*. Klaten: Cempaka Putih.
- Ulfa , R. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa di Desa Kampunganyar Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi. *E-Theses UIN Maulana Malik Ibrahim Malang*.
-

DOKUMENTASI KEGIATAN

1. Acara Focuss Group Discussion (FGD)



2. Acara Pelatihan dan Penyusunan Laporan Keuangan Puskesmas Menjadi BLUD dengan narasumber Eko Fatah Yasin, SE, M. Ak, Ak, CA, ACPA, CPA, BKP, CPI





3. Acara Sosialisasi dan Pendampingan Penyusunan dan Pelatihan Laporan Keuangan Puskesmas Menjadi BLUD



